

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Propenas, dan Repetada adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terjamin kesejahteraan, melindungi kehidupan bangsa, serta mampu mencakup kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuk organisasi sektor publik untuk mengatur kepentingan negara. Pemerintah dan bagian-bagiannya merupakan perwujudan organisasi sektor publik tersebut, yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat setiap organisasi selalu ingin tujuannya tercapai secara efektif dan efisien, maka pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini tertuang dalam UU RI No. 32 tahun 2004, tentang Pokok-pokok pemerintah daerah. Salah satu kewenangan dalam peraturan rumah tangga adalah tentang keuangan daerah yang tertuang dalam UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu wewenang yang termuat dalam UU tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang diterapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ruang lingkup keuangan daerah adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah memerlukan akuntansi yang bukan hanya merupakan pembukuan transaksi semata melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan

informasi keuangan guna pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan, baik sektor swasta atau bisnis maupun sektor publik untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi yaitu pengendalian manajemen dan akuntabilitas publik.

Pemerintah menetapkan salah satu bidang akuntansi yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi yang disediakan nanti berguna untuk pengambilan keputusan pengalokasian sumberdaya, pemilihan program yang efektif, efisien dan ekonomis, serta pemilihan investasi, juga digunakan untuk indikator pengukuran kinerja, dan tahap akhir adalah pelaporan keuangan yang merupakan akuntabilitas kepada publik. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kemampuan pengendalian keuangan daerah yang baik maka tujuan akan tercapai sesuai dengan rencana.

Jika Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah belum diterapkan maka akan berakibat, yaitu :

1. Terlambatnya informasi, sehingga menghambat para manajer dalam mengambil keputusan yang tepat.
2. Terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi yang ada, dan membuat bingung para pengguna laporan keuangan tersebut.
3. Kemungkinan besar pengeluaran lebih besar dari penerimaan, tidak adanya kontrol dalam menggunakan anggaran.
4. Terjadi manipulasi laporan keuangan.
5. Banyak terjadi penyimpangan dalam menggunakan uang anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peranan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dalam skripsi yang berjudul :

“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung”.

Judul tersebut diatas sebelumnya sudah pernah dibuat oleh saudara Muhammad Marga Ambari, lulusan Universitas Widyatama tahun 2007. Dengan judul yang sama Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang dilaksanakan di kota Bandung sudah memadai
2. Apakah pengelolaan keuangan daerah di Kota Bandung sudah efektif
3. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang dilaksanakan di kota Bandung sudah memadai.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah di kota Bandung telah efektif.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pemerintahan dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Peneliti

Syarat pencapaian dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang yang diteliti, melatih berpikiran kritis, logis, dan mampu menyerap informasi, khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.

2. Pemerintah Kota Bandung

Penelitian diharapkan berguna sebagai informasi sekaligus sumbangan pemikiran untuk penilaian kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif.

3. Pihak Lain

Bagi pihak lain diharapkan bermanfaat sebagai sumber pemikiran dan informasi untuk penelitian lebih mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai mana sektor swasta maka pemerintah yang juga merupakan sektor publik memerlukan akuntansi, baik untuk penyediaan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.

Berbagai macam definisi akuntansi dalam keuangan daerah oleh para ahli dalam perkembangan akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Menurut *AICPA* definisi akuntansi seperti yang termuat dalam *Statement of the Accounting Principles Board No. 4 (APB No. 4)* yang diterjemahkan dan dikutip oleh **Indra Bastian (2001:117)** adalah :

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas (kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan”.

Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas adalah yang aktivitasnya berhubungan dengan suatu usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut **Indra Bastian (2001:6)** definisi Akuntansi Sektor Publik adalah :

“Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Pengelolaan keuangan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan APBD yang menggunakan akuntansi sebagai alatnya. Bagian akuntansi yang digunakan adalah sistem akuntansi. Pada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sistem akuntansi juga digunakan.

Definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut **Muhammad Gade (2000:95)** adalah :

“Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintah.”

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah :

“ Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi laporan keuangan pemerintah. “

Hasil akhir sistem akuntansi pemerintah daerah adalah laporan keuangan daerah. Menurut **Keppmendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah,**

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan keuangan pemerintah terdiri :

1. Realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Keuangan daerah merupakan sumber-sumber keungan yang ada di daerah, dan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pada era sebelum reformasi alat yang digunakan manajemen keuangan daerah adalah tata usaha daerah, setelah pasca reformasi alat pengelolaan yang digunakan adalah akuntansi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi keterbatasan tata usaha daerah dalam proses anggaran dan penyajian laporan yang lebih informatif kepada pengguna.

Definisi dari keuangan daerah sendiri menurut **PP RI No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah** adalah :

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah”.

Menurut **Arinta Kustandi (1995:151)** mengenai pengelolaan daerah :

“Pengelolaan keuangan Nagara pada hakekatnya adalah pengelolaan APBN.”

Maka jika kita berbicara pengelolaan keuangan daerah menurut **Abdul Halim (2004:2)** :

“Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan APBD.”

Oleh sebab itu pembahasan pengelolaan keuangan daerah disini membahas pengelolaan APBD yang merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka. Dari semua urain di atas, dapat diambil inti bahwa keuangan daerah (APBD) merupakan objek sistem akuntansi

pemerintah daerah dimana dalam proses anggaran daerah sistem akuntansi dipakai untuk mengelola sehingga efisiensi keuangan daerah dan efektivitas pencapaian tujuan daerah.

Definisi efektivitas menurut **Mardiasomo (2004:134)** adalah :

“ Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.”

Tujuan tadi dapat tercapai dengan perencanaan yang baik, perencanaan yang baik didukung dengan sistem yang menghasilkan informasi yang baik dan memadai. Sistem akuntansi pemerintah daerah hasil akhirnya adalah laporan keuangan daerah, yang bisa memberi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan kegiatan atau program serta pelaksanaannya untuk masa yang akan datang.

Dengan demikian, untuk sementara penulis menyimpulkan dengan diterapkannya sistem akuntansi pemerintah daerah yang memadai dapat menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik, dengan pendekatan studi kasus. **Saifudin Anwar (2001:7)** menyatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di bagian keuangan pemerintahan kota Bandung yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak pemerintah kota Bandung yaitu bagian keuangan serta bagian-bagian lain yang terkait

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data penyusunan skripsi ini adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jalan Banda No. 28 Bandung. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Agustus 2009 sampai dengan selesai.